

ANTON GUNADI SANG *GODFATHER*

Hutan di Kalimantan kini benar-benar sunyi, setelah Kapolri menginstruksikan kepada segenap jajarannya untuk tidak memberikan toleransi kepada para pencuri dan penelundup kayu.

PERINTAH itu tertuang dalam kebijakan dan strategi Kapolri. Oleh karena itu, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan dilakukan secara terus menerus, ibarat perang yang tak pernah usai.

Tekad Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dan Menteri Kehutanan untuk menuntaskan kasus illegal logging dilakukan secara serius. Hal ini terbukti bahwa kegiatan pembalakan liar yang terjadi di negeri ini, turun secara drastis. Dan sudah banyak pejabat maupun mantan pejabat, anggota dewan dan para cukong kayu yang merugikan negara harus diusut dan dijebloskan ke dalam sel.

Diakui atau tidak, Propinsi Kalimantan Selatan termasuk daerah yang potensial terhadap illegal logging. Di sini, illegal

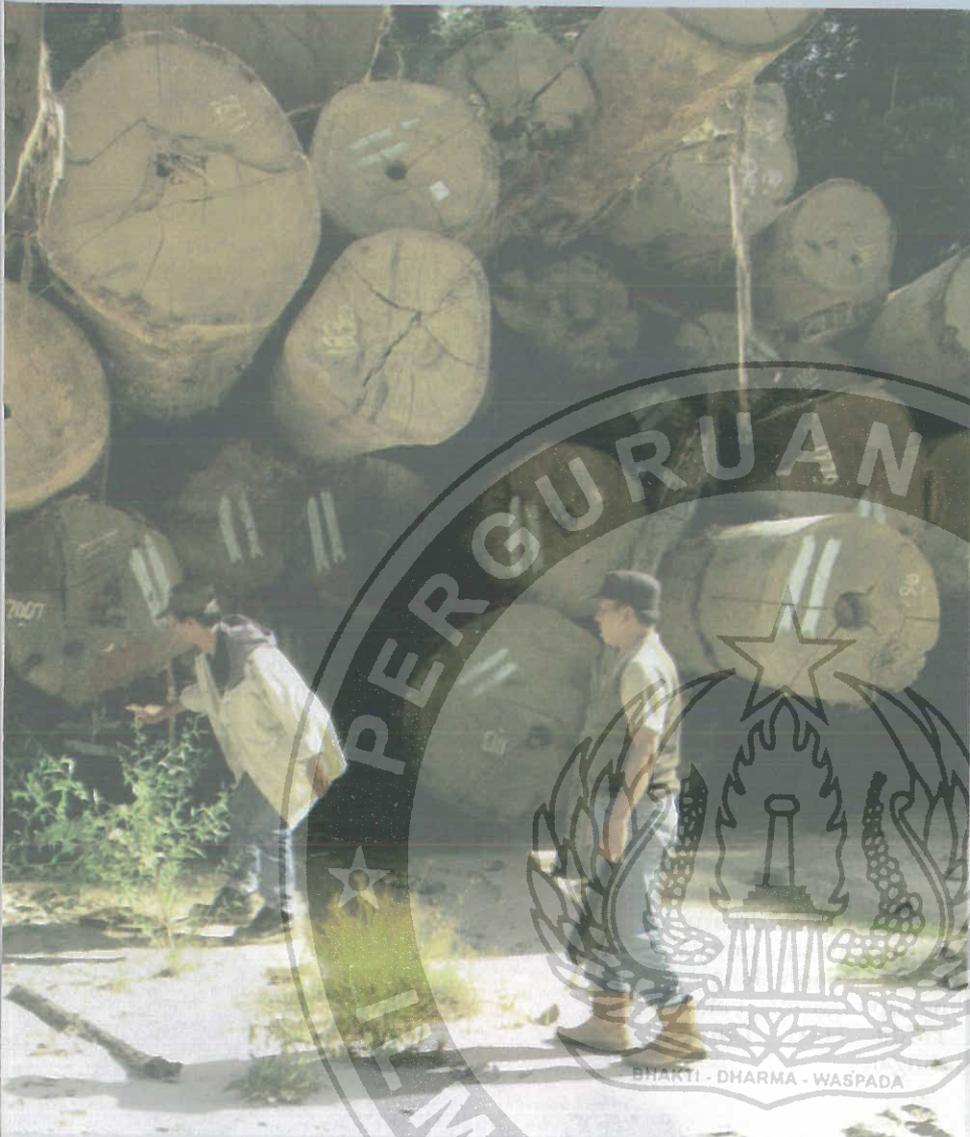
logging identik dengan Anton Gunadi. Dialah sang penjarah hutan belantara, dialah yang mencukur kawasan hutan itu menjadi gundul. Tak ada yang tak kenal Anton Gunadi, aktor illegal logging yang sekarang menjadi buronan polisi.

Hal itu dibenarkan Direktur Reserse dan Kriminal Polda Kalsel, Kombes Pol Drs Wahyu Adi, di Banjarmasin. Menurutnya, illegal logging di Kalsel sekarang terjadi penurunan secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah gendang perang itu ditabuh Presiden SBY di awal tugasnya.

Dikatakan, Polda Kalsel saat ini sedang menangani kasusnya Anton Gunadi yang sempat menjadi

perhatian publik bahkan menjadi berita nasional. Jadi, kata Wahyu Adi, kasusnya Anton Gunadi semuanya ada tiga kasus yang berbeda tapi pelakunya sama.

◀◀ Kombes Pol Drs Wahyu Adi



Dijelaskan bahwa kasus yang pertama dengan barang bukti kapal tongkang Damar Laut, TKP nya di Muara Alalak, Banjarmasin, dengan pemilik kayu adalah Anton Gunadi (AG), sekarang DPO. Kemudian yang menguasai kayu Satib (SS), sekarang sudah divonis tujuh bulan. Lalu tersangka lainnya H. Muhammad Saleh (HMS). "HMS itu yang membantu atau turut serta ini berkasnya sudah kembali empat kali. Itu kasus yang pertama," terang Wahyu Adi.

Kemudian kasus yang kedua, LP/K-No 25-3/II/2006/DR tanggal 1 Maret 2006, kapal tongkang Sandi Dewa, tersangkanya juga tiga orang, A, SS, dan HMS. Pemilik ka-

yu AG, yang menguasai kayu SS, kemudian yang turut membantu HMS.

Ternyata, kasus illegal logging yang melibatkan tiga tersangka ini, terjadi penafsiran hukum. Menurut Departemen Kehutanan, dinyatakan bahwa seluruh kayu ilegal. Sementara menurut kehutanan yang ada di Kalsel, tidak illegal. Lalu, ahli hukum pidana dari Unair mengatakan ini adalah pidana. Jadi, kata Wahyu Adi, kasus ini sebenarnya sederhana, tapi ada kepentingan-kepentingan pihak lain.

"Kasus ketiga sama. Jadi sekarang ini, sudah ada 9 berkas dengan 3 kasus. Tersangkanya sama tapi kasusnya berbeda-beda. Karena di-

tangkapnya juga berbeda-beda. Tongkangnya juga berbeda-beda. Kasus ini menjadi polemik dan menjadi berita nasional," jelas Wahyu Adi.

Kombes Pol Drs Wahyu Adi mengatakan, bahwa sampai sekarang menjadi buronan dan sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Sekarang pihak polda masih menyelesaikan berkas yang bolak balik sampai empat kali. Jadi, karena tersangka ini tidak mampu mendekati dan menggalang polisi, maka menggalang penegak hukum yang lain. "Jujur saja, ada oknum anggota yang lebih membela AG, dari pada institusinya," katanya.

SKSHH DIRUBAH MENJADI FAKTUR

Sementara itu, Dirreskrim Polda Kalsel, juga mengatakan bahwa sekarang yang lagi *ngetren* adalah adanya aturan-aturan baru soal per kayu yang harus diikuti yakni mengenai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2006, Nomor 51, 55 dan 64, tentang per kayu.

Sehingga masalah per kayu sekarang tidak lagi menggunakan istilah Surat Keterangan Sisa Hasil Hutan (SKSHH), tapi menggunakan istilah Faktur. Jadi, kata Wahyu Adi, ada hal yang tidak tersurat—kenapa terjadi perubahan dari SKSHH menjadi Faktur? Sampai sekarang pertanyaan itu belum terjawab.

Menyikapi hal itu, ada yang berpendapat kalau sepanjang masih digunakan istilah SKSHH, maka penjahat-penjahat yang bergerak di bidang per kayu yang di DPO, namanya akan tetap ada. Tetapi, begitu berubah menjadi Faktur, maka dengan sendirinya nama-nama Daftar Pencarian Orang (DPO) itu, akan hilang terhapus.

Dengan terbitnya istilah baru itu, sekarang polda sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan surat-surat itu. Jadi, kata Wahyu Adi, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terungkap. Ini untuk membuktikan bahwa dengan adanya perubahan itu semakin mempermudah orang melakukan kejahatan di bidang per kayu. [Bud]

Tiada Hari Tanpa Jaringan

Informasi itu mahal... Dan ternyata, laporan hasil intelijen yang baik adalah tergantung dari jaringan informasi...

PALING tidak, seperti itulah tugas seorang intelijen. Dan sudah menjadi tugasnya bahwa intelijen adalah suatu badan yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi. Wilayah tugasnya termasuk melingkupi bidang yang berkaitan dengan politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Menyikapi hal itu, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Kalsel, Kombes Pol Drs Arkian Lubis, SH mengatakan, bahwa pihaknya tak henti-hentinya membentuk dan mengembangkan jaringan intelijen di Propinsi Kalimantan Selatan. "Artinya, jaringan intelijen yang kita butuhkan adalah jaringan yang terencana secara selektif," kata Arkian Lubis, ketika ditemui Jagratara di Banjarmasin.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud jaringan terencana secara selektif adalah benar-benar

diperhitungkan lini-lini mana yang harus ada jaringan. Yang semuanya bertujuan supaya bisa mendapatkan informasi yang kebenarannya tinggi. Jadi, kata Arkian, informasi yang tingkat kebenarannya sangat tinggi, itu yang kita harapkan selain bisa berkomunikasi dengan cepat.

Dikatakan bahwa Jaringan informasi itu, terus dipantau dan tiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi. "Tujuannya, apakah ada organisasi baru yang perlu dibangun. Jadi, kita selalu menjalin hubungan. Selain itu, bila ada kegiatan yang berhubungan tugas polri, juga kita fasilitasi," kata Arkian Lubis, mantan Wakil Direktur Intelkam Polda Metro Jaya.

Karena itulah, pria kelahiran Pematang Siantar, 9 April 1961, yang sekarang sudah dikaruniai 3 anak ini, punya motto tak jauh dengan lingkup tugasnya, yakni "Tiada Hari Tanpa Jaringan".

Lulusan Akabri bagian Kepolisian tahun 1984 ini, punya kenangan tersendiri, yakni ketika pertama kali ia mendapat penugasan di Aceh, tahun 1984-1988, sebagai kapolsek Belang Pidie, dan kapolsek selektif Jenpa Birun.

Ceritanya, tugas di Aceh ada tantangan tersendiri dan sangat spesifik sekali. Selain daerahnya terpencil, kenang Arkian, saat itu juga baru mulai menjamurnya GPK di Aceh. Sehingga, sangat dibutuhkan kedekatan dengan masyarakat. Dan itu tidak gampang. Akhirnya, kata Arkian, untuk semua itu saya harus belajar dengan anggota dan banyak melakukan komunikasi.

Lalu, pengalaman tugas lainnya didapat ketika Arkian bertugas di NTT. "Ini juga terpencil. Masyarakatnya miskin, dan curah hujan sangat minim. Di sini, keinginannya selalu ingin dekat dengan masyarakat dan memberi ban-



tuan," jelasnya.

Arkian mengakui bahwa keinginan untuk memberi bantuan itu selalu ada. Namun, tak ada yang bisa diberikan. Padahal di Polda NTT, Arkian menjabat sebagai Kapolres Timor Tengah Selatan. "Jadi, memang tidak ada yang bisa diberikan. Saya pernah renovasi masjid karena sudah 20 tahun tidak dirawat. Itu saja dananya saya mintakan rekan-rekan Jagratara dengan mengedarkan proposal," ceritanya, sambil menambahkan bahwa renovasi itu sempat menimbulkan kontroversi dengan masyarakat setempat.

Dan pengalaman yang ketiga, pada waktu tugas di Polda Metro Jaya, sebagai Wadir Intelkam. Dari NTT yang gersang hijrah ke Metropolitan Jakarta Raya. "Alhamdulillah.. mungkin ini berkah dari Allah, karena di NTT saya renovasi masjid. Tapi, ini juga karena perjuangan rekan JeTe," jelasnya.

Hatinya masih berbunga, dari tanah yang tandus, kering, dan sunyi beralih ke metropolitan yang penuh hingar-bingar dengan panorama nan indah dan gedung-gedung menjulang tinggi. Siapa pun, pasti akan mendambakan dan bertugas di Jakarta, yang mempunyai predikat Polda type khusus. Polda Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya.

Lantaran itu, Arkian Lubis, yang akrab dipanggil Arkian, menganggap tugas di Polda Metro Jaya, dimasukkan dalam kategori pengalaman tugas yang menarik. "Menariknya karena ada lompatan kerja yang luar biasa. Pertama kali tugas di Polda Metro, pertama kali pula ada kegiatan akbar—pemilu secara langsung. Jadi, banyak kegiatan yang aneka ragam, termasuk siaga satu yang tak pernah berhenti," jelas Arkian dengan riang.

Ternyata, nasib baik masih berpihak kepada lulusan PTIK tahun 1990, dan Sespimpol tahun 2000. Pasalnya, lepas dari jabatan Wadir Intelkam Polda Metro Jaya, pada bulan Desember 2004, Arkian mendapat promosi jabatan di tempat tugas yang baru sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido Polda Metro Jaya. Dan tak lama kemudian, hanya dengan hitungan hari, tepatnya pada tanggal 1 Janu-

ari 2005, Arkian Lubis mendapat kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Komisariss Besar Polisi.

Lengkap sudah kebahagiaan Arkian Lubis beserta keluarga yang dicintai. Bingkai kehidupan yang dijalani silih berganti tentu saja sudah banyak kenikmatan yang dirasakan. Ada penderitaan yang pernah dirasakan dan ada ketaatan yang pernah dijalani.

Kini, di Polda Kalimantan Selatan, Arkian Lubis sedang giat-giatnya melaksanakan program Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs Halba Rubis Nugroho, yang mencanangkan program "Mari Berubah"

Membangun dan mengembangkan jaringan intelijen, merupakan program yang harus dilaksanakan. Jadi, kata Arkian, tidak boleh sembarangan. Sebaliknya, kita harus bisa membangun dan mengembang-

jaringan intelijen di semua lini kehidupan sosial masyarakat secara terencana.

Disamping itu, melakukan pendataan dan informasikan rencana kegiatan harian masyarakat yang berdampak kepada ancaman kamtibmas kepada semua fungsi. Dan pointer selanjutnya adalah meningkatkan kegiatan deteksi dini terhadap setiap permasalahan yang berdampak terhadap terjadinya gangguan kamtibmas. Lalu, mempersiapkan personel intel terpilih yang akan ditugaskan selaku *inside agent* pada obyek sasaran selektif.

"Semuanya sudah tersusun dan harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena program ini sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang pemolisian masyarakat," jelasnya.

[bud]

DIRESKRIM POLDA ACEH
BESERTA STAF & JAJARANNYA

Mengucapkan
Selamat & Sukses

**RAKERNIS FUNGSI RESERSE
DAN FUNGSI INTELIJEN**

Jakarta, 13-16 Maret 2007

**MELALUI KONSOLIDASI, PERUBAHAN
DAN AKSELERASI KITA TINGKATKAN
PROFESIONALISME SERTA KINERJA
PENYIDIK DALAM RANGKA
MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM**

Direskrim Polda Aceh

Kombes Pol Drs Suedi Husein